

# **KINERJA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DALAM PROGRAM PENANGGULANGAN KERAWANAN PANGAN DI KABUPATEN CIAMIS**

**Nurul Trisasmita Sari**

*Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia*

E-mail: nurultrisasmitasari@gmail.com

## **ABSTRAK**

*Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih terdapat beberapa daerah dengan tingkat kerawanan pangan yang rendah. Rendahnya responsivitas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam pengembangan usaha kelompok tani dan kurangnya peran aktif Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam membantu kelompok tani untuk mengembangkan produk pertanian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan datanya yaitu studi pustaka, observasi dan wawancara serta triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa: 1) Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam Program Penanggulangan Kerawanan Pangan di Kabupaten Ciamis pada umumnya telah dilaksanakan namun kurang optimal. 2) Hambatan – hambatan yang dihadapi untuk meningkatkan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam program penanggulangan kerawanan pangan di Kabupaten Ciamis yaitu kurangnya komunikasi dan koordinasi, kurangnya kesiapan petugas untuk turun ke daerah menyerap keluhan kelompok tani. 3) Upaya–upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan untuk meningkatkan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam Program Penanggulangan Kerawanan Pangan di Kabupaten Ciamis yaitu melakukan komunikasi dan koordinasi serta bekerjasama dengan intens meminta kesiapan petugas untuk turun ke daerah menyerap keluhan kelompok tani, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.*

**Kata Kunci :** *Kinerja, Program Penanggulangan Kerawanan Pangan.*

## **PENDAHULUAN**

Kinerja Organisasi merupakan sebuah alat ukur untuk dapat menilai dan mengevaluasi berhasil atau tidaknya suatu tujuan organisasi. Kinerja organisasi yang baik sangat berpengaruh terhadap pelayanan masyarakat. Namun sampai saat ini

birokrasi belum mampu menunjukkan kondisi prima sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Rendahnya kinerja pelayanan publik akan membangun citra buruk pada instansi, dimana masyarakat yang merasa tidak puas dengan pelayanan dari suatu instansi akan menceritakan

kepada masyarakat yang lain. Begitu pula sebaliknya, apabila semakin baik kinerja pelayanan publik yang diberikan maka masyarakat merasa puas dan akan menjadi nilai plus bagi instansi tersebut.

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh instansi pemerintah adalah bagaimana mereka mampu melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien, karena selama ini pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat di identikkan dengan kinerja yang berbelit-belit, tidak ada standar yang pasti, penuh dengan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Sejumlah patologi tersebut akan menjadi hambatan dalam menjalankan suatu program atau kegiatan yang telah direncanakan oleh organisasi.

Tuntutan akan reformasi kinerja sumber daya yang berkualitas selaras dengan bunyi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 12, yaitu:

Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengawasan penyelenggara tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksana kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tersebut terfokus pada kinerja,

peningkatan hasil, produktivitas, dan pengembangan pemanfaatan potensi. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara merupakan keputusan dari pemerintah pusat, sehingga aturan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya di instansi pemerintah lainnya seperti di provinsi maupun kabupaten.

Untuk dapat mengetahui tingkat kinerja organisasi maka diperlukan pengukuran dan penilaian kinerja. Pengukuran dan penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan serta visi dan misinya. Dengan adanya pengukuran dan penilaian kinerja, maka upaya untuk memperbaiki kinerja dapat dilakukan secara sistematis sehingga organisasi dapat berjalan secara efektif, efisien, dan responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pertanian dan ketahanan pangan yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan penyelenggaraan urusan pertanian dan pangan. Dalam melaksanakan program penanggulangan kerawanan pangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan membutuhkan kinerja yang baik dan terstruktur, evaluasi kinerja dengan adanya pengukuran dan penilaian kinerja agar program penanggulangan kerawanan pangan di Kabupaten Ciamis dapat terlaksana sesuai dengan

yang telah direncanakan. Program ketahanan pangan tersebut diarahkan pada kemandirian masyarakat/petani yang berbasis sumberdaya lokal yang secara operasional dilakukan melalui program peningkatan produksi pangan, menjaga ketersediaan pangan yang cukup, aman dan halal di setiap daerah dan antisipasi agar tidak terjadi kerawanan pangan di Kabupaten Ciamis.

Upaya untuk menuju pada peningkatan kesejahteraan petani atau masyarakat Kabupaten Ciamis secara operasional akan dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:

1. Pemberdayaan masyarakat;
2. Penyuluhan;
3. Peningkatan mutu pangan;
4. Penjaminan usaha;
5. Perlindungan harga produk,
6. Kebijakan proteksi dan promosi.

Berdasarkan hasil peninjauan yang dilakukan di lapangan, ditemukan permasalahan menyangkut masih rendahnya kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam Program Penanggulangan Kerawanan Pangan di Kabupaten Ciamis. Hal ini terlihat dari indikator-indikator sebagai berikut:

1. Masih terdapat beberapa daerah dengan tingkat kerawanan pangan yang rendah. Hal ini dapat terlihat dari data bahwasanya di Kabupaten Ciamis masih terdapat beberapa titik rawan pangan yaitu di Kecamatan Sukamantri, Kecamatan

Cikoneng, dan Kecamatan Banjaranyar

2. Rendahnya responsivitas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam pengembangan usaha kelompok tani. Hal ini terlihat dari kurangnya motivasi, apresiasi dan promosi produk lokal yang kurang menarik.
3. Kurangnya peran aktif Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam membantu kelompok tani untuk mengembangkan produk pertanian, sehingga mengakibatkan rendahnya keanekaragaman pangan masyarakat.

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, untuk itu rumusan masalah dalam penelitian yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam Program Penanggulangan Kerawanan Pangan di Kabupaten Ciamis?
2. Bagaimana hambatan - hambatan yang di hadapi dalam melaksanakan Program Penanggulangan Kerawanan Pangan di Kabupaten Ciamis?
3. Bagaimana upaya – upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi

untuk meningkatkan Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis dalam Program Penanggulangan Kerawanan Pangan di Kabupaten Ciamis?

3. Responsivitas
4. Responsibilitas
5. Akuntabilitas

Kinerja organisasi merupakan gambaran mengenai hasil kerja organisasi dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini kinerja organisasi yang dimaksud adalah tingkat pencapaian ataupun hasil kerja dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis dalam menjalankan program penanggulangan kerawanan pangan di Kabupaten Ciamis

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Pengertian Kinerja**

Kinerja sering diterjemahkan sebagai penampilan, prestasi kerja, tingkat keberhasilan ataupun pencapaian dari suatu target yang menunjukkan pelaksanaan hasil dari individu atau kelompok individu yang dinilai berdasarkan ukuran-ukuran dari suatu sistem pengukuran kinerja. Menurut Amstrong dan Baron (Wibowo 2017: 7) mengemukakan bahwa:

Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang diajarkan dan bagaimana cara mengerjakannya

Selanjutnya Dwiyanto (Nawawi, 2017:244-245) menjelaskan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi, yaitu:

1. Produktivitas
2. Kualitas Layanan

### **2. Pengertian Organisasi**

Menurut Mukarom dan Wijaya Laksana (2015: 25) “Organisasi secara umum dapat diartikan sebagai bentuk formal sekelompok manusia dengan tujuan individualnya masing-masing yang bekerja sama dalam suatu proses tertentu untuk mencapai tujuan bersama”. Sedangkan menurut Kast dan James E. Rosenzweig (Nawawi 2017: 3) “organisasi didefinisikan sebagai sekelompok orang yang terikat secara formal dalam hubungan atasan dan bawahan yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama pula”.

Berdasarkan teori-teori diatas dapat dipahami bahwa organisasi adalah sekelompok individu yang memiliki kepentingan masing-masing yang bekerjasama, dan berkoordinasi dalam rangka mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

### **3. Pengertian Ketahanan Pangan**

Ketahanan pangan terjadi apabila semua orang secara terus menerus, baik secara fisik, sosial, dan ekonomi mempunyai akses untuk pangan yang

memadai/cukup, bergizi dan aman, yang memenuhi kebutuhan pangan mereka dan pilihan makanan untuk hidup aktif dan sehat (Safa'at, 2013).

Pemerintah Indonesia melalui Dewan Ketahanan Pangan bekerja sama dengan World Food Programme (WFP) membuat Food Insecurity Atlas (FIA) tingkat kabupaten. Pertama diluncurkan Food Insecurity Atlas pada tahun 2005, lalu diperbaharui lagi dengan membuat Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) tahun 2009 yang dibuat berdasarkan pendekatan: ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan (Dewan Ketahanan Pangan 2009)

## **METODE**

1. Pendekatan Penelitian  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini data yang ingin dicapai oleh peneliti bukanlah data dalam bentuk angka-angka, akan tetapi data dalam bentuk kalimat naratif yang memaparkan apa adanya mengenai subjek dan objek yang diteliti
2. Waktu dan Tempat Penelitian  
Waktu penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 12 bulan, terhitung mulai dari bulan Des 2019 sampai dengan bulan Desember 2020, mulai dari tahap peninjauan, penelitian sampai pada sidang skripsi. Tempat penelitian ini di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis
3. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam Program Penanggulangan Kerawanan Pangan. Dalam penelitian ini yang menjadi informan sebanyak 8 orang yang terdiri dari:

Kepala Dinas	:	1 orang
Kepala Bidang	:	1 orang
Ketua Forum Pelatihan Pangan	:	1 orang
Ketua Kelompok Tani	:	5 orang

Data dalam penelitian ini yaitu data kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam Program Penanggulangan Kerawanan Pangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan, studi lapangan, dokumentasi dan triangulasi

4. Teknik Analisis Data  
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu: Reduksi data (*data reduction*), Penyajian data (*data display*) dan Penarikan Kesimpulan dan verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berikut peneliti sajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan

Pangan dalam Program Penanggulangan Kerawanan Pangan Kabupaten Ciamis:

### **1. Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam Program Penanggulangan Kerawanan Pangan di Kabupaten Ciamis**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam Program Penanggulangan Kerawanan Pangan Kabupaten Ciamis pada umumnya telah dilaksanakan namun kurang optimal. Hal ini ditunjukkan dari jawaban informan yang menyatakan masih terdapat beberapa pelaksanaan yang kurang optimal.

Untuk lebih jelasnya dapat dibahas setiap dimensi sebagai berikut:

#### **a. Produktivitas**

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi produktivitas diketahui bahwa stok pangan yang ada di wilayah Kabupaten Ciamis memang cukup memadai dan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Ciamis. Hal ini ditunjukkan dengan produksi padi dari wilayah Ciamis selatan yang merupakan lumbung padi terbesar. Selain itu produksi jagung di setiap Kecamatan cukup merata, produksi terbesar berada di Kecamatan Tambaksari dan Sukadana serta Rancah. Rata-rata stok padi setiap tahunnya di Kabupaten Ciamis sekitar 513.851 ton dan jagung 30.894 ton, ditambah stok pangan yang lainnya yang cukup memadai, hal ini mengindikasikan stok pangan di

Kabupaten Ciamis cukup memadai dan merata.

Selanjutnya Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis telah memiliki berbagai dokumen dan bukti pelaksanaan program penanggulangan kerawanan pangan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Neraca Bahan Makanan-Pola Pangan Harapan Ketersediaan (NBM-PPH), Sistem Kewaspadaan Pangan Dan Gizi (SKPG), Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) serta Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Selain dokumen tersebut juga ada data tentang jumlah hasil produksi pangan dari setiap kecamatan.

Dengan demikian maka kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis dilihat dari dimensi produktivitas secara umum telah dilaksanakan secara optimal.

Produktivitas merupakan faktor sangat penting dalam mempertahankan dan mengembangkan keberhasilan suatu organisasi/perusahaan. Sebagaimana yang kita ketahui, setiap organisasi/perusahaan menginvestasikan sumber-sumber vital (sumber daya manusia, bahan dan uang) untuk memproduksi barang/jasa. Dengan menggunakan sumber-sumber daya manusia tersebut secara efektif akan memberikan hasil yang lebih baik.

Uraian di atas sejalan dengan yang dikemukakan Sedarmayanti, (2014:57) bahwa:

Produktivitas adalah bagaimana menghasilkan atau meningkatkan

hasil barang dan jasa setinggi mungkin dengan memanfaatkan sumber daya manusia secara efisien. Oleh karena itu produktivitas sering diartikan sebagai rasio antara keluaran dan masukan dalam satuan tertentu

Berdasarkan teori di atas bahwa produktivitas merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai dan keseluruhan sumber daya yang dipergunakan. Dengan demikian produktivitas berhubungan dengan efisiensi penggunaan sumber daya (masukan dalam menghasilkan tingkat perbandingan antara keluaran dan masukan).

#### b. Kualitas Layanan

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi kualitas layanan diketahui bahwa pihak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis masih kurang tanggap dalam merespon keluhan-keluhan dari kelompok tani. Hal ini ditunjukkan dengan adanya keluhan mengenai sistem pengairan dan irigasi yang masih minim, ketersediaan pupuk yang tidak terjangkau oleh petani dan penggunaan alat-alat pengolahan lahan yang masih tradisional serta aspek permodalan. Semua keluhan tersebut masih kurang mendapat respon dari pihak dinas.

Kemudian untuk pemberian bantuan yang diberikan pada kelompok tani terlihat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan masih belum berperan aktif untuk memberikan bantuan baik berupa bantuan teknis maupun bantuan yang bersifat alat-alat

pertanian, banyak kelompok tani yang mengeluhkan dan mengharapkan bantuan-bantuan yang diberikan dari pihak pemerintah daerah khususnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Selanjutnya untuk harga-harga beberapa hasil pertanian mengalami ketidakstabilan harga di pasaran sehingga banyak petani yang tidak bisa menjual hasil pertaniannya karena akan merugi, harga dipasaran tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan oleh petani.

Kualitas pelayanan publik merupakan komponen penting yang harus diperhatikan dalam pelayanan publik. Istilah kualitas pelayanan publik tentunya tidak dapat dipisahkan dari persepsi tentang kualitas. Hardiyansyah (2011:36), mengemukakan bahwa:

Kualitas pelayanan adalah sesuatu yang berhubungan dengan terpenuhinya harapan/kebutuhan pelanggan, dimana pelayanan dikatakan berkualitas apabila dapat menyediakan produk dan jasa (pelayanan) sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. Dalam hal ini, kualitas pada dasarnya terkait dengan pelayanan yang baik, yaitu sikap atau cara karyawan dalam melayani pelanggan atau masyarakat secara memuaskan.

Berdasarkan teori di atas bahwa kualitas pelayanan merupakan totalitas dari kemampuan pihak penyelenggara

pelayanan dalam memberikan layanan akan produk (barang atau jasa) maupun layanan administrasi kepada pelanggan/masyarakat, yang dapat memenuhi kebutuhan dan dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan berdasarkan kesesuaian dengan harapan dan kenyataan yang diterima oleh pelanggan/masyarakat.

c. Responsivitas

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi responsivitas diketahui bahwa pihak dinas telah menjalin koordinasi dengan baik terhadap kelompok-kelompok petani yang ada di wilayah kerja dinas, koordinasi ini dilakukan untuk mengetahui ketersediaan pangan, cadangan pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya.

Kemudian pihak dinas telah dapat mengembangkan program-program yang memang telah memiliki dampak yang positif bagi peningkatan ketahanan pangan seperti adanya pengembangan program lumbung pangan masyarakat yang selama ini cukup berhasil yang bertujuan untuk pengembangan penyediaan cadangan pangan bagi masyarakat

Selanjutnya pihak dinas telah mampu mengenali masalah-masalah yang terjadi di setiap wilayah kerjanya sehingga dapat dipilih alternatif-alternatif program yang akan dilaksanakan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya masalah yang terjadi di daerah Kabupaten Ciamis bagian utara yang memang permasalahan yang dihadapi berupa kondisi geografis yang tidak memungkinkan untuk lahan

pertanian sehingga dilaksanakan program penanaman hortikultura dan agribisnis yang memfokuskan pada hasil perkebunan.

Responsivitas (*responsiveness*) merupakan kemampuan pemerintah (organisasi) untuk mengenali kebutuhan, menyusun agenda dan prioritas, mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Disini responsivitas menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan dengan kebutuhan masyarakat. Semakin banyak kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan oleh Organisasi publik responsivitas organisasi tersebut dinilai semakin baik.

Hal tersebut sejalan dengan ungkapan Kumorotomo (2013:50) yang menyatakan bahwa:

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan

organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

Dengan demikian berdasarkan teori di atas bahwa Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Camis responsivitas sebagai upaya dalam memberikan pelayanan yang merupakan bukti kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Organisasi yang mempunyai responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang rendah.

#### d. Responsibilitas

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi responsibilitas diketahui bahwa Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah dapat melakukan pengawasan terhadap program kegiatan. Hal ini terlihat dengan dilakukannya pemantauan terhadap pelaksanaan tugas penyuluh dan

kegiatan penyuluhan pada kelompok tani, pengawasan ketersediaan pangan, cadangan pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan, pengawasan penggunaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian.

Kemudian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan program kegiatannya masih terlihat ada yang kurang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Hal ini terlihat dari adanya kegiatan-kegiatan penyuluhan pada kelompok tani yang belum sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya misalnya pada kegiatan pemberian teknis terkait usaha pertanian di bidang hortikultura dan perkebunan

Dengan demikian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis telah sejalan dengan pendapat Azheri (2012: 86), dalam dimensi responsivitas yang menyatakan bahwa:

Responsibilitas adalah hal yang dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk putusan, keahlian, kemampuan, dan kecakapan. Kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang ditimbulkan

Berdasarkan teori di atas bahwa responsibilitas merupakan kemampuan organisasi untuk mengatur sejauhmana pemberian layanan telah berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang

diberlakukan atau prosedur yang telah di atur. Responsibilitas mengukur tingkat partisipasi pemberi layanan melaksanakan tugasnya. Responsibilitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana proses pemberian pelayanan publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan administrasi dan organisasi yang benar telah ditetapkan.

e. Akuntabilitas

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi akuntabilitas diketahui bahwa Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis telah mengevaluasi beberapa pencapaian pelaksanaan program kegiatan dengan optimal. Hal ini ditunjukkan dengan dimilikinya beberapa data dan dokumen pelaksanaan program seperti jumlah kelembagaan kelompok tani di setiap kecamatan, produksi pangan setiap tahunnya dan program-program lainnya yang memang datanya telah dimiliki oleh pihak dinas

Selanjutnya setiap pelaksanaan program kegiatan telah terlihat ada laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh setiap unit kerja dinas. Laporan ini terlihat seperti adanya laporan hasil dari kegiatan, nantinya dijasikan pertimbangan untuk menentukan langkah berikutnya, laporan pertanggungjawaban ini tentunya sebagai bentuk dari prosedur telah dilaksanakan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Dalam beberapa pengertian, akuntabilitas pada umumnya dikaitkan pada proses pertanggungjawaban

terhadap serangkaian bentuk pelayanan yang diberikan atau yang telah dilakukan. Akuntabilitas merujuk kepada pertanggungjawaban seseorang kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban.

Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan Kumorotomo (2013:4) bahwa:

Akuntabilitas menjadi ukuran apakah aktivitas pemerintah atau pelayanan yang dilakukan telah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya.

Mengacu teori di atas diketahui bahwa akuntabilitas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis yaitu merupakan wujud proses pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), dimana akuntabilitas yang merupakan prinsip utama terselenggaranya pemerintahan yang baik dan menjadi salah satu acuan pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik

## **2. Hambatan – Hambatan yang Dihadapi untuk Meningkatkan Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam Program Penanggulangan Kerawanan Pangan di Kabupaten Ciamis**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa hambatan-hambatan untuk meningkatkan kinerja Dinas Pertanian

dan Ketahanan Pangan dalam Program Penanggulangan Kerawanan Pangan di Kabupaten Ciamis, antara lain sebagai berikut:

- a. Kurangnya respon atas keluhan dari kelompok tani yang disebabkan oleh kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan kelompok tani, kesiapan petugas untuk turun ke daerah menyerap keluhan kelompok tani masih kurang dan kurangnya kesediaan kelompok tani untuk menyampaikan keluhan.
- b. Kurangnya peran aktif dalam membantu kelompok tani yang disebabkan oleh kurang dimilikinya sumber daya manusia, keterbatasan anggaran dan terbatasnya ketersediaan berbagai fasilitas pendukung pertanian serta kurangnya komitmen petugas
- c. Belum optimalnya perlindungan terhadap harga pasar yang disebabkan oleh kurang terjalannya koordinasi dengan pihak terkait, adanya permainan oknum pengusaha, adanya permainan tengkulak dan terjadinya gejolak politik serta adanya kebijakan pemerintah pusat.
- d. Belum optimalnya pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang disebabkan oleh masih rendahnya kemampuan sumber daya manusia, kurangnya pemberian arahan dan petunjuk pelaksanaan

program kegiatan pada pegawai dan petugas dan kurang dimilikinya kemampuan pegawai dan petugas dalam melaksanakan program-program kegiatan serta kurangnya kesiapan dari kelompok tani.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi untuk meningkatkan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam Program Penanggulangan Kerawanan Pangan di Kabupaten Ciamis berupa kurangnya komunikasi dan koordinasi, kurangnya kesiapan petugas untuk turun ke daerah menyerap keluhan kelompok tani, kurang dimilikinya sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, terbatasnya fasilitas pendukung pertanian serta kurangnya komitmen petugas, permainan oknum pengusaha dan tengkulak, gejolak politik serta kurangnya kesiapan dari kelompok tani.

Kinerja dari suatu organisasi tidak akan terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi, baik yang memberikan dampak positif maupun sebaliknya. Kinerja merupakan suatu konstruk multi dimensional yang mencakup banyak faktor yang mempengaruhinya. Menurut Amstrong dan Baron dalam (Wibowo, 2011: 300), faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah:

- a. Faktor personal/individu, meliputi: pengetahuan, keterampilan (skill), kemampuan, kepercayaan

diri, motivasi dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu.

- b. Faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan dan dukungan yang diberikan manajer dan team leader.
- c. Faktor tim, meliputi: kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan keeratn anggota tim.
- d. Faktor sistem, meliputi: sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi dan kultur kinerja organisasi
- e. Faktor kontekstual (situasional), meliputi: tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Dengan demikian dari uraian di atas bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat berpengaruh pada kinerja organisasi baik dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal organisasi, oleh karena itu faktor-faktor tersebut menjadi faktor yang sangat penting untuk diperhatikan oleh organisasi karena dapat menghambat peningkatan kinerja organisasi.

### **3. Upaya – Upaya yang Dilakukan dalam Mengatasi Hambatan-Hambatan yang**

### **Dihadapi untuk Meningkatkan Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan Program Penanggulangan Kerawanan Pangan di Kabupaten Ciamis**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan untuk meningkatkan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam Program Penanggulangan Kerawanan Pangan di Kabupaten Ciamis, antara lain sebagai berikut:

- a. Merespon dengan cepat atas keluhan kelompok tani dengan cara melakukan komunikasi dan koordinasi dengan kelompok tani secara rutin, meminta kesiapan petugas untuk turun ke daerah menyerap keluhan kelompok tani dan mengajak kelompok tani untuk siap sedia dalam menyampaikan keluhan.
- b. Meningkatkan peran aktif untuk membantu kelompok tani dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan diberikannya arahan dan petunjuk pelaksanaan program, mengajukan permohonan penambahan sumber anggaran dan menyediakan berbagai fasilitas pendukung pertanian serta memberikan bimbingan sikap pada pegawai dan petugas lapangan.
- c. Mengoptimalkan perlindungan terhadap harga pasar dengan cara menjalin komunikasi dan

koordinasi serta bekerjasama dengan pihak dinas terkait dan Bulog, menindak tegas oknum pengusaha, tengkulak dan melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga.

- d. Mengoptimalkan pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan cara meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, diberikannya arahan dan petunjuk pelaksanaan program kegiatan pada pegawai dan petugas dan meminta kesiapan dari kelompok tani untuk selalu siap sedia.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa telah dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam Program Penanggulangan Kerawanan Pangan di Kabupaten Ciamis berupa melakukan komunikasi dan koordinasi serta bekerjasama dengan intens meminta kesiapan petugas untuk turun ke daerah menyerap keluhan kelompok tani, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, pengajuan penambahan sejumlah sumber anggaran, penyediaan fasilitas pendukung pertanian serta memberikan bimbingan sikap pada pegawai dan petugas, menindak tegas terhadap oknum pengusaha dan tengkulak, dan melakukan operasi pasar.

Uraian di atas sejalan dengan pendapat menurut Chaizi Nasucha (Irham Fahmi 2013:3) bahwa:

Kinerja organisasi adalah efektifitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenan melalui usaha-usaha yang sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus untuk mencapai kebutuhan secara efektif.

Dengan demikian kinerja organisasi merupakan ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan serta visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan melalui usaha-usaha yang sistemik guna meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus untuk mencapai tujuan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam Program Penanggulangan Kerawanan Pangan di Kabupaten Ciamis pada umumnya telah dilaksanakan namun kurang optimal. Hal ini ditunjukkan dari jawaban informan yang menyatakan masih terdapat beberapa pelaksanaan yang kurang optimal. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam Program Penanggulangan Kerawanan Pangan di Kabupaten

Ciamis telah dilaksanakan namun belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal karena masih terdapat beberapa indikator yang pelaksanaannya kurang sesuai dengan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi.

2. Hambatan – hambatan yang dihadapi untuk meningkatkan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam program penanggulangan kerawanan pangan di Kabupaten Ciamis yaitu kurangnya komunikasi dan koordinasi, kurangnya kesiapan petugas untuk turun ke daerah menyerap keluhan kelompok tani, kurang dimilikinya sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, terbatasnya fasilitas pendukung pertanian serta kurangnya komitmen petugas, permainan oknum pengusaha dan tengkulak, gejolak politik serta kurangnya kesiapan dari kelompok tani.
3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan untuk meningkatkan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam Program Penanggulangan Kerawanan Pangan di Kabupaten Ciamis yaitu melakukan komunikasi dan koordinasi serta bekerjasama dengan intens meminta kesiapan petugas untuk turun ke daerah menyerap keluhan kelompok tani,

meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, pengajuan penambahan sejumlah sumber anggaran, penyediaan fasilitas pendukung pertanian serta memberikan bimbingan sikap pada pegawai dan petugas, menindak tegas terhadap oknum pengusaha dan tengkulak, dan melakukan operasi pasar.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Azheri, Busyra. (2012). *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: PT Raja Grafindo. Persada.
- Dewan Ketahanan Pangan. (2009). *Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia (Food Security and Vulnerability Atlas of Indonesia)*. Jakarta :Dewan Ketahanan Pangan.
- Fahmi, Irham. (2013). *Pengantar Manajemen Keuangan*. Bandung : Alfabeta.
- Hardiyansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Yogyakarta : Gava Media.
- Kumorotomo, Wahyudi. (2013). *Akuntabilitas Birokrasi Publik : Sketsa pada masa transisi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mukarom, Zaenal dan Muhibudin Wijaya Laksana. (2015).

- Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Nawawi Hadari. (2017). *Perencanaan SDM Untuk Organisasi Profit Yang Kompetitif*. Yogyakarta: UGM Press.
- Safa'at, R. (2013). *Rekonstruksi Politik Ketahanan Hukum Pangan*. UBPress: Malang.
- Sedarmayanti. 2014. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Mandar Maju.
- Wibowo. 2011. *Manajemen Kinerja*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo. Persada.
- Wibowo. (2017). *Manajemen Kinerja*. Edisi Ke-5. Jakarta. Rajawali Press.
- Dokumen**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.